

DAMPAK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA SEKTOR PARIWISATA KOTA PADANG**Mai Sarah Khairani^{1(a)}, M. Fachri Adnan^{2(b)}**^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang^{a)}Maisarahkhairani5@gmail.com, ^{b)}fachri.adnan@gmail.com**INFORMASI
ARTIKEL****Article History:**

Dikirim:

11-02-2023

Diterbitkan Online:

31-03-2023

Kata Kunci:

Penanganan, Pandemi Covid-19, Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pariwisata

Keywords:*Handling, COVID-19 Pandemic, Local Opinion, Tourism Sector***Corresponding Author:***fachri.adnan@gmail.com***ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan melakukan analisis dampak dari penanganan pandemi Covid-19 akan pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada sektor Pariwisata di Kota Padang. Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber pada proses uji keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh turunnya banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang pada tahun 2020 sebesar 53% dan dengan adanya penanganan pandemi covid-19 tersebut membatasi aktivitas sektor industri pariwisata yang berdampak terhadap pendapatan pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata industri perhotelan yang mana tahun 2020 terdapat penurunan terhadap sebesar 49% dari tahun sebelumnya diikuti industri restoran sebesar 31%, serta pajak hiburan mengalami penurunan dari tahun 2020-2021 sebesar 23,39% dan retribusi mengalami penurunan sebesar 2% selama tahun 2020-2021. Pada penelitian ini bisa diambil kesimpulan dimana kebijakan penanganan pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif terhadap sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah di Kota Padang. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya cara yang sesuai dalam pengatasan mengatasi dampak negative ini dan memperkuat sektor pariwisata di Kota Padang sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah Pada Sektor Pariwisata.

ABSTRACT

This research purpose to analyze the impact of handling the Covid-19 pandemic on Regional Original Revenue (PAD) in the Tourism sector in Padang City. The method used in this research was descriptive qualitative. In this study using source triangulation techniques in testing the validity of the data. The results of this study indicate that the policy for handling the Covid-19 pandemic has a negative impact on Regional Original Income (PAD). This was caused by a decrease in the number of tourists visiting the city of Padang in 2020 by 53% and with the handling of the Covid-19 pandemic limiting the activities of the tourism industry sector which had an impact on local tax revenue originating from the tourism sector, the hospitality industry which in 2020 was a decrease of 49% from the previous year followed by the restaurant industry by 31%, and entertainment taxes decreased from 2020-2021 by 23.39% and levies decreased by 2% during 2020-2021. In this study, it can be concluded that the policy for handling the Covid-19 pandemic has a negative impact on the tourism sector and local revenue in the city of Padang. Therefore, there is a need for an appropriate strategy to overcome this negative impact and strengthen the tourism sector in the city of Padang so that it can increase local revenue in the tourism sector.

DOI:<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i1.76>

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 atau Virus Corona (Severe Respiratory Syndrome Corona virus 2/SARSCoV2) tinggi nya tingkat penyebaran telah dirasakan seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun pariwisata termasuk sektor yang mengalami dampak dari wabah Covid-19.

Terjadinya fenomena yang mana kasus pengidap COVID-19 yang terus meningkat pemerintah mengambil tindakan Percepatan Penanganan Covid 19 di Indonesia. Penanganan merupakan suatu tahap lanjutan dari sebuah kebijakan sehingga diketahui hasil capaian atas penanganan yang di implementasikan. Pemerintah mengambil Langkah dengan mengeluarkan kebijakan dan membentuk Satuan Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 dibawah struktur komite penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan dan tindakan percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia antara lain mematuhi protokol kesehatan 3 M , penyelenggaraan 3T ,program Vaksinasi Nasional ,melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) , Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) , PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel kebijakan penanganan ini diberlakukan di seluruh Indonesia termasuk Kota Padang. (<https://bnpb.go.id>).

Penanganan Pandemi Covid-19 mengakibatkan terganggunya beberapa sektor yang ada di kota Padang. Sektor Pariwisata pun turut merasakan dampak dari adanya pandemi ini terlihat dari banyaknya wisatawan mancanegara dan domestik yang melakukan kunjungan pada Kota Padang terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 53% dibandingkan pada tahun sebelumnya (Dinas Pariwisata kota Padang Penurunan jumlah wisatawan selama pademi disebabkan karena adanya pembatasan mobilitas penduduk yang terjadi di seluruh Dunia . (<https://ppid.padang.go.id>, 2021).

Pariwisata merupakan salah satu penghasil sumber devisa sub sektor unggulan bagi negara. Keberadaan pariwisata memberikan dampak yang baik bagi perkembangan wilayah seperti membangkitkan tatanan dan meningkatkan perekonomian daerah, membentuk kreativitas dan inovasi penduduk local, memberikan kesejahteraan masyarakat diarea sekitar pariwisata, serta pariwisata memiliki potensi dan keanekaragaman wisata mulai dari wisata

alam,laut,social,budaya (Hellen & Soemanto, 2017).

Pemerintahan kota Padang telah menerapkan PSBB dengan memberlakukan pembatasan massa ditempat-tempat umum. Walikota Padang juga memberikan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, pegawai negeri dan lansia total yang telah menerima vaksin sebesar 30 ribu individu hal ini di sampaikan oleh Wali Kota Padang (Harian Republik, 2021).

Kota Padang tercatat kategori zona merah dalam kasus Covid-19 upaya pemerintah dalam menekan pertumbuhan Covid-19 belum sejalan dengan Perwako Nomor 32 tahun 2020 jumlah kasus terus bertambah dan pemerintah melakukan aturan yaitu pembatasan pengunjung ke Kota Padang agar tidak terjadi *overcrowding*, hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran publik yang belum percaya dan masih banyak melanggar aturan PSBB yang ada di kota Padang dan enggan nya masyarakat untuk melakukan Swab Test Covid-19 dikarenakan jika dinyatakan positif maka diwajibkan untuk isolasi sehingga aktivitas masyarakat jadi terhenti. Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penghambat dalam memutuskan rantai penyebaran covid-19 yaitu masih banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas diluar rumah seperti akitivitas perkantoran yang seharusnya *work from home* tetapi hanya dilakukan beberapa bulan saja, selanjutnya protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas dirumah ibadah masih belum dijalankan dengan baik , aktivitas di sektor industri di kota padang belum konsisten aturan masih banyaknya tempat usaha yang buka dan melayani pelanggan secara langsung dan beberapa sektor di industri pariwisata yang dikelola masyarat masih dibuka hal tersebut memancing pengunjung untuk datang sehingga terjadinya kerumunan dan adanya interaksi sehingga kemungkinan besar penyebaran Covid-19 semakin besar.

Sektor yang berdampak dan mempengaruhi Pendapatan masyarakat maupun pendapatan Asli daerah yaitu sektor Pariwisata karena Kota Padang memiliki pesona alam dan potensi destinasi yang indah yang jadi tujuan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara untuk berwisata. Kota Padang memiliki banyak destinasi wisata, tempat kuliner dan lainnya. dengan adanya Covid 19 berdampak terhadap sektor pariwisata Kota Padang , seperti yang di ungkapkan Bapak Tri Pria Anugrah selaku Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf bidang

Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang “ Covid-19 memberikan dampak terhadap beberapa objek wisata, banyak nya usaha-usaha ditutup , pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya disekitar pantai padang dan pantai purus dilarang beroperasi di karenakan adanya pemberlakuan kebijakan penanganan Covid-19 ini dengan di berlakukannya PSBB”.

Dampak penanganan pandemi Covid-19 dapat dipastikan dirasakan oleh seluruh rantai nilai pariwisata. Tekanan yang terjadi pada sektor pariwisata terlihat pada rendahnya kunjungan ataupun kedatangan wisatawan domestic ataupun mancanegara terlihat dari jumlah kedatangan wisman wisnum melalui Bandara Internasional Minangkabau.

Tabel 1. Jumlah Wisman Wisnus di Kota Padang 2018-2020

Jumlah Wisatawan	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik		Persentase perubahan (%)
	2019	2020	
M mancanegara	88351	21660.00	75%
Domestik	5384236	2562966.00	53%
Jumlah	5472587	2584626.00	46%

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang

Melalui Tabel 1 bisa dilihat dimana adanya perubahan banyaknya wisman sebesar 75% dan wisnus sebesar 53% pada tahun 2020. Hal ini diakibatkan oleh adanya kebijakan seperti pembatasan berskala besar pembatasan kegiatan masyarakat baik dari negara lain ataupun dari negara Indonesia khususnya Kota Padang. Hal ini juga diakibatkan dari ketelambatan perjalan domestic mengingat adanya wabah ini masyarakat diperkirakan enggan untuk melakukan perjalan. Berikut data berdasarkan pengunjung Wisman Wisnu Melalui pintu Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Tabel 2. Jumlah Kedatangan Wisman Wisnus melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

Bulan_Jumlah	Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Barat Melalui BIM (orang)		
	2019	2020	2021
Januari	4052	4341	0
Februari	5155	4038	0
Maret	6220	2495	0
April	5471	-	0
Mei	3582	-	0
Juni	5237	-	0
Juli	5197	-	0
Agustus	5985	-	0
September	4435	1	0
Oktober	5276	-	0
November	5021	-	0
Desember	5180	-	0
Jumlah	60811	10875	0

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang

Dengan adanya penurunan jumlah wisatawan, berdampak pula pada industri-industri yang ada di sektor pariwisata berupa barang dan jasa pemberhentian kegiatan operasional jasa. Kondisi ini berlanjut Ketika kota Padang menerapkan menjalankan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana setiap bidang aktivitas pariwisata yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020. Beberapa sektor wisata contohnya wisata bersejarah, wisata alam dan wisata budaya turut dihentikan dalam operasionalnya.

Dampak dari adanya kebijakan-kebijakan selama Pandemi Covid-19 mengalami rugi tidak sekedar memberikan efek terhadap pelaksanaan pariwisata dengan langsung , sektor yang menunjang pariwisata seperti turut merasakan dampaknya seperti jasa, hotel, Restoran dan lain sebagainya.

Dengan berdampaknya sektor pariwisata dimasa Pandemi Covid-19 maka mempengaruhi besar realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Hal ini ungkapkan oleh kepala dinas Kota Padang “Sektor Pariwisata termasuk sektor pendongkrang prekonomian yang mana turut sebagai penyumbang PAD terbesar di Kota Padang, maka di masa pandemic tiga bulan itu begitu banyak sekali potensi PAD berkurang ,di perkirakan hilangnya pendapatan melalui retribusi daerah berkisar Rp. 174 miliar”. (<https://infopublik.id/2020>).

Berdasarkan dari pemaparan permasalahan, maka penulis ingin melakukan kajian lebih dalam mengenai **“Dampak Penangan Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pariwisata Kota Padang”**.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini melalui penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang melahirkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang bisa diperhatikan.(Sugiyono, 2007:1). Penelitian kualitatif ialah sebuah penelitian yang dipakai pada penelitian akan alamiah dimana peneliti menjadi instrumen utama pada penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen.Oleh sebab itu pada penelitian orang atau Human Instrument pada penelitian ini memakai Teknik dalam meraih data melalui cara observasi lewat melihat fenomena yang terjadi dilapangan,wawancara dengan informan dari Substansi bidang evaluasi dan pelaporan Ibu Siti Gloria,SS,M.I.Kom dan Substansi Bidang Destinasi Pariwisata Bapak Tri Pria Anugrah, S,STP.

Data yang dipakai pada penelitian ini yakni data sekunder yang diraih melalui BPS Kota Padang, BPS.Prov.Sumbar Buku Kepariwisata Dispar Kota Padang , Lakip dispar ,PID Kota Padang dan Renstra Dinas Pariwisata kota Padang. Uji Keabsahan data penelitian dilakukan melalui Teknik triangulasi, Menurut William Wiersman (1986)dalam Sugiyono (2011:273) triangulasi pada pengujian kredibilitas ini dimaknai menjadi upaya mengecek data melalui bermacam sumber lewat cara yang bervariasi dan pada bermacam waktu , penelitian memakai Teknik triangulasi sumber melalui perbandingan informasi yang diraih melalui sumber yang beragam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penanganan Pandemi Covid-19 di sektor Pariwisata Kota Padang

Pada upaya menghentikan mata rantai penyebaran Covid19 peran masyarakat merupakan peran yang sangat penting supaya tidak membuat sumber penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan *droplet infection* melalui satu orang ke orang lain, resiko penularan lebih besar kanrna dapat terjadi baik dirumah,lalu lintas, tempat

kerja,rumah ibadah, tempat wisata maupun tempat umum lainnya dimana adanya orang melakukan interaksi. Berbagai tindakan dilakukan demi mengakhiri ancaman virus yang menyerang terus menerus. Dibeberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah mengeluarkan suatu pedoman dan protokol kesehatan khusus untuk dalam upaya menghadapi virus corona.

Adapun pedoman tersebut sudah dimuat pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Mengenai acuan dalam mencegah Dan mengendalikan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yaitu menerapkan 3M yaitu membersihkan tangan, pakai masker dan mengatur jarak. Untuk melengkapi 3M tersebut saat ini ditetapkan dengan 5M yaitu menghindari kerumuman serta membatasi mobilitas. (Setlight,Rahman & Mandagi , 2022).

Dengan adanya arahan dari presiden dalam perancangan protokol masyarakat produktif dan aman maka dibentuk panduan pelaksanaan kebersihan kesehatan , upaya selamat dan lestariannya lingkungan bagi sektor ekonomi pariwisata dan kreatif . Pemerintah Kota di bantu oleh dinas Pariwisata Kota Padang memberlakukan pelaksanaan Clenallness, Health, Safety and Enviromental Sustainability (CHSE) ialah acuan pelaksanaan operasional dalam mencegah dan mengendalikan corona virus disesase 2019 (COVID-19).

Dalam menerapkan panduan ini mempunyai tujuan dalam menunjang peningkatan rasa sadar dari masyarakat akan kebersihan kesehatan dan keselamatan dan kelestarian lingkungan , sertadunia pariwisata harus siap untuk memberikan jaminan kebersihan,kesehatan,keselamatan dan kelestarian lingkungan yang tinggi terhadap produk dan pelayanan yang disediakan kepada wisatawan. (Kemenparekaf, 2020) Sasaran dari panduan kebijakan CHSE ini tertuju pada para pelaku pengusaha dan pengelola fasilitas , bagi karyawan dan pemandu wisata lokal dan bagi pengunjung. CHSE ini memberikan dampak positif pada dunia pariwisata dikarenakan para industri-industri dan wisatawan yang berhubungan dengan pariwisata dapat melaksanakan kegiatan berwisata dengan nyaman dan aman di masa Pandemi Covid-19 dan akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan diberlakukannya panduan kebijakan CHSE ini memberikan batasan ruang

serta gerak masyarakat mengingat masih merambahnya virus corona ini di Kota Padang.

Berdasarkan Penelitian dan analisis yang peneliti lakukan berdasarkan dampak kebijakan penanganan pandemic Covid-19 yaitu protokol kesehatan, Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada sektor Pariwisata Kota Padang menyebabkan beberapa dampak yang dijelaskan dari indikator penelitian :

a) Kunjungan Wisatawan

Menurut Suryadana Lita (2015) Kunjungan wisata merupakan tindakan berpergian dan perjalanan yang dilaksanakan oleh sekumpulan atau orang melaksanakan kunjungan pada tempat tertentu lewat tujuan rekreasi, bisnis, pengembangan pribadi, spiritual atau tujuan penelitian keunikan daya tarik disuatu tempat pada waktu yang pendek. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penanganan pandemi Covid-19 di Kota Padang dengan menutup dan melarang seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang pada fasilitas umum dan penunjang sektor pariwisata mengakibatkan rendahnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Padang, tidak hanya berpengaruh pada wisatawan lokal jumlah kunjungan juga berdampak pada wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Jumlah Wisman Wisnus di Kota Padang 2018-2021.

Menurut Suryadana Lita (2015) Kunjungan wisata ialah aktivitas perjalanan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang melalui kunjungan pada lokasi khusus menuju tujuan rekreasi, bisnis, pengembangan pribadi, spiritual atau tujuan penelitian sifat unik dan daya tarik pada sebuah lokasi di waktu yang singkat.

Tabel 3. Jumlah Wisman Wisnus di Kota Padang 2018-2021

Jumlah Wisatawan	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik 2019-2021			Persentase selisih %
	2019	2020	2021	
M mancanegara	88351	21660	2.4561	-97%
Domestik	5384236	2562966	2000732	-110%
Jumlah	5472587	2584626	2025293	-11%

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang

Dengan Adanya kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu aturan selama penanganan pandemi Covid-19 di Kota Padang tersebut turut berdampak pada sektor-sektor ekonomi yang mana Kota Padang, Kota Padang merupakan Kota yang berkembang melalui

aktivitas ekonomi di Sektor Pariwisata, mempunyai potensi dan daya Tarik untuk wisatawan alam melaksanakan kunjungan disebabkan kota padang menyuguhkan pesona wisata alam yang mempesona. Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pariwisata Kota Padang memiliki andil yang besar dalam memberikan sosialisasi, pengawasan, himbauan serta memberikan bantuan pelaku usaha di sektor pariwisata Kota Padang berdasarkan protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penanganan pandemi Covid-19 di Kota Padang dengan menutup dan melarang seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang pada fasilitas umum dan penunjang sektor pariwisata mengakibatkan rendahnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Padang, tidak hanya berpengaruh pada wisatawan lokal jumlah kunjungan juga berdampak pada wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara hal tersebut dapat diketahui dari persentase yang menunjukkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 97% dan domestik sebesar 50%. Ini menunjukkan perubahan yang signifikan akan banyaknya kunjungan dari wisatawan menuju Kota Padang.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Vivi Ukhwatul (2020) berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang dampak pandemi terhadap pariwisata Sumatera Barat menyatakan Pandemi memberikan dampak yang signifikan akan kurangnya banyak kunjungan dari wisatawan, pendapatan sektor transportasi dan pergudangan serta, penyediaan akomodasi makanan minuman serta kerugian dan penurunan pendapatan usaha.

Dengan Adanya kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu aturan selama penanganan pandemi Covid-19 di Kota Padang tersebut turut berdampak pada sektor-sektor ekonomi yang mana Kota Padang, Kota Padang merupakan Kota yang berkembang melalui aktivitas ekonomi di Sektor Pariwisata, memiliki potensi dan daya Tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dikarenakan kota padang menyuguhkan pesona wisata alam yang mempesona. Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pariwisata Kota Padang memiliki andil yang besar dalam memberikan sosialisasi, pengawasan, himbauan serta memberikan bantuan pelaku usaha di sektor pariwisata Kota Padang berdasarkan protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19.

b) Jumlah Akomodasi dan Tingkat Hunian Penginapan/Hotel

Pemerintah memberikan usaha dan upaya dalam berkegiatan wisata di kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak dinas pariwisata Kota Padang pemerintah kota padang beserta dinas pariwisata mengadakan kegiatan serta program terhadap para pelaku usaha di bidang pariwisata terkhususnya pada penyedia akomodasi di Kota Padang . Dengan mensosialisasikan dan menerapkan program panduan pelaksanaan Clenaliness,Health, Safety and Enviromental Sustainability (CHSE) dengan adanya panduan tersebut memberikan standar kesehatan terhadap kelayakan akomodasi dan pengunjung. Dengan adanya program tersebut berdampak positif dan negatif terhadap beberapa akomodasi di kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dampak yang diakibatkan oleh penanganan pandemi dengan mengeluarkan kebijakan Protokol kesehatan, PSBB dan PPKM Covid-19 sektor pariwisata juga berdampak pada berkurangnya pengunjung hotel atau tingkat hunian hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung dengan tujuan untuk berwisata ataupun berbisnis di Kota Padang hal ini juga mengakibatkan pada berkurangnya jumlah akomodasi tempat penginapan atau hotel di Kota Padang.

Tabel 4. Jumlah Akomodasi Hotel di Kota Padang 2019-2021

Klasifikasi Hotel	Jumlah Akomodasi Hotel (Unit)		
	2019	2020	2021
Hotel Bintang Lima	1	-	-
Hotel Bintang Empat	8	9	10
Hotel Bintang Tiga	8	13	14
Hotel Bintang Dua	13	11	11
Hotel Bintang Satu	8	11	11
Hotel Non Bintang	77	71	76
Padang	115.00	115.00	122

Sumber: BPS Prov.sumbar

Tabel 5. Tingkat Penghunian Kamar Hotel tahun 2021 menurut Tahun dan Kelas Hotel

Tahun/ years	Kelas Hotel/Hotel Classification				Seuruh kelas hotel/All class
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Non Bintang
2021	19,40%	37,24%	49,39%	49,25%	42,13%
2020	17,94%	29,18%	45,70%	40,36%	35,34%
2019	36,85%	51,01%	63,39%	62,67%	56,00%
2018	35,54%	59,04%	63,13%	59,44%	56,18%

Sumber: BPS Prov.sumbar

Berdasarkan data tersebut dengan kebijakan penanganan pandemic Covid-19 berupa PSBB dan PPKM di masa Pandemi Covid-19

mengakibatkan banyaknya kunjungan wisatawan berkurang ditandai terhadap berkurangnya jumlah akomodasi hotel di Kota Padang, hotel bintang lima mengalami *collapase* sehingga pada tahun 2020-2021 tidak adanya penambahan akomodasi hotel serta hotel bintang dua dan non bintang mengalami penurunan pada tahun 2020. Semua klasifikasi taraf pengisian Kamar hotel pada tahun 2020 mengalami pengurangan jumlah tingkat hunian rata-rata sebesar 33,70%. Akan tetapi pada tahun 2021 tingkat hunian hotel menunjukkan persentase kenaikan yang meningkat sebesar 38,82%.

Berdasarkan hasil penelitian dampak yang diakibatkan oleh penanganan pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata juga berdampak pada berkurangnya pengunjung hotel atau tingkat hunian hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung dengan tujuan untuk berwisata ataupun berbisnis di Kota Padang hal ini juga mengakibatkan pada berkurangnya jumlah akomodasi tempat penginapan atau hotel di Kota Padang pada klasifikasi kelas hotel bintang lima , hotel bintang dua serta hotel non berbintang pada tahun 2020-2021. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah klasifikasi tingkat hunian kamar hotel pada tahun 2020 mengalami penurunan tingkat hunian sebesar 33,70 persen namun pada tahun 2021 menunjukkan perubahan dengan kenaikan sebesar 38,82 persen.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Wicaksono (2020) dengan judul penelitian Analisis Dampak Syariah Di Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Hotel Yogyakarta Pandemi Covid-19 hasil penelitian Wicaksono menunjukkan pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap terhadap hotel Syariah salah satunya hotel Unisi Yogyakarta mengakibatkan tidak membuka ruang bagi tamu sepanjang 5 bulan, terjadinya penurunan pendapatan di atas 70 persen, namun demikian tidakadanya PHK yang diberikan pihak manajemen akan karyawan hotel. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat pengurangannya akomodasi hotel terlihat adanya hotel bintang ataupun non bintang yang tidak beroperasi bahkan terjadi *collapse* , serta adanya pengurangan tingkat hunian kamar hotel.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah terhadap para pelaku usaha diindustri perhotelan melalui dinas pariwisata Kota Padang ialah dengan mensosialisasikan dan memberikan sertifikasi CHSE yang menjadi standar untuk

pemilik tempat penginapan atau hotel dalam melakukan kegiatan dan beroperasi agar dapat menjalankan industri perhotelan ini dengan aman dan nyaman.

c) Akomodasi Rumah Makan atau Restoran

Restoran merupakan salah satu penunjang dan bagian dari usaha pariwisata menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan restoran merupakan salah satu usaha yang menyediakan dan memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata . Rumah makan atau restoran yang tersedia di Kota Padang merupakan suatu pendukung terhadap daya tarik pariwisata di Kota Padang, akan tetapi dengan adanya kebijakan penanganan pandemi covid-19 para pelaku usaha rumah makan atau restoran mengalami kesulitan.

Tabel 6. Jumlah Restoran di Kota Padang 2019-2020

Jumlah Akomodasi Makanan & Minuman (Restoran) di Kota Padang Pada Tahun 2019-2020		
2019	2020	2021
336	318	312

Sumber : BPS Prov.Sumbar

Dalam kaitannya dengan dampak,perlu dipahami disetiap kebijakan ada terdapat dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari dampak penanganan pandemi Covid-19 pada sektor Pariwisata Kota Padang berdampak pada sektor industri pendukung pariwisata yaitu restoran, atau rumah makan,terdapat beberapa restoran atau rumah makan yang tutup pada saat ditetapkannya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 pada masa PSBB akan tetapi pada masa PPKM sejumlah restoran atau rumah makan boleh beroperasi dengan syarat telah mendapatkan sertifikat CHSE dan standar protokol kesehatan yang telah ditentukan Pada masa PPKM menerapkan pelayanan makan ditempat (*dive in*) dibatasi hanya sebesar 25% pengunjung dan jam pelayanan operasional di batasi, dan memenuhi permintaan *take away* dan *delivery order* dimasa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian dari dampak penanganan pandemi Covid-19 pada sektor Pariwisata Kota Padang memberikan dampak terhadap sektor industri pendukung pariwisata yaitu restoran, atau rumah makan, penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa restoran atau

rumah makan yang tutup pada saat ditetapkannya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 pada masa PSBB akan tetapi pada masa PPKM sejumlah restoran atau rumah makan boleh beroperasi dengan syarat telah mendapatkan sertifikat CHSE dan standar protokol kesehatan yang telah ditentukan agar adanya kepercayaan konsumen terhadap produk yang aman,sehat dan higienis, hasil penelitian menunjukkan pada masa PPKM menerapkan pelayanan makan ditempat (*dive in*) dibatasi hanya sebesar 25% pengunjung dan jam pelayanan operasional di batasi, dan memenuhi permintaan *take away* dan *delivery order* dimasa Pandemi Covid-19.

Restoran merupakan salah satu penunjang dan bagian dari usaha pariwisata menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan restoran merupakan salah satu usaha yang menyediaaakn dan memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata . Rumah makan atau restoran yang tersedia di Kota Padang merupakan suatu pendukung terhadap daya tarik pariwisata di Kota Padang, akan tetapi dengan adanya kebijakan penanganan pandemi covid-19 para pelaku usaha rumah makan atau restoran mengalami kesulitan Dalam kaitannya dengan dampak,perlu dipahami disetiap kebijakan ada terdapat dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Manutur, dkk (2021) dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 bagi Usaha Rumah Makan Selera Laut menunjukkan terjadinya dampak terhadap permintaan pasar yang terpengaruh dan rantai pasokan yang berubah sulit sehingga terjadinya penurunan arus kas. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan adanya penurunan konsumen atau pelanggan yang menerapkan sistem makan atau *dive in* diakiabatkan adanya rasa khawatir atau enggan tertularnya virus corona , dan adanya pembatasan jam operasional yang terbatas efek melalui adanya kebijakan penanganan pandemi covid-19, dan pemenuhan permintaan *take away* dan *delivery* cukup efektif di masa penerapan PPKM .

d) Jumlah Objek Wisata dan Tempat Hiburan

Berdasarkan hasil penelitian dari dampak penanganan pandemi Covid-19 di sektor pariwisata berdampak terhadap jumlah kunjungan destinasi wisata dan tempat hiburan di Kota Padang, hal ini bisa ditinjau melalui adanya pembatasan pada semua destinasi

wisata, pengunjung wajib mengikuti aturan dan kapasitas untuk pengunjung yang datang dibatasi sebesar 50 persen, jumlah objek wisata pada masa penanganan pandemi covid-19 menunjukkan terjadinya pengurangan Jumlah objek wisata yang signifikan yang mengharuskan beberapa objek wisata ditutup, berikut jumlah objek wisata di Kota Padang pada tahun 2020.

Tabel. 7 Jumlah Objek Wisata Di Kota Padang 2018-2020

Jumlah Objek Wisata/Number Of Tourism Objects				
Uraian/ Description	2018	2019	2020	Satuan Unit
Alam/ Natural	28	29	29	Buah/Unit
Bahari/ Nautical	37	37	37	Buah/Unit
Sejarah/ Kepurbakalaan/ History / Archaeological	75	74	74	Buah/Unit

Sumber : *Buku Kepariwisata 2021*

Dampak lain yaitu adanya pembatalan event yang sebelumnya telah di rancang oleh dinas Pariwisata Kota Padang dengan tujuan menarik wisatawan dan meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Padang, permasalahan yang ditemukan adalah terkendala akibat biaya operasional dan pemeliharaan yang kurang memadai.

Berdasarkan dari penelitian dan analisis menyangkut terhadap dampak penanganan pandemic Covid-19 terhadap pariwisata dapat diketahui bahwa penanganan pandemic berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan, sebesar 11% dari jumlah wisatawan mancanegara dan domestic, akibatnya mempengaruhi jumlah beberapa sektor industri pariwisata sehingga berdampak terhadap jumlah akomodasi dan tingkat hunian Hotel, akomodasi restoran, serta jumlah akomodasi dan pengunjung objek wisata dan tempat hiburan di Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian dari dampak penanganan pandemi Covid-19 di sektor pariwisata berdampak terhadap jumlah kunjungan destinasi wisata dan tempat hiburan di kota padang, hal ini bisa ditinjau melalui adanya pembatasan di setiap destinasi wisata, pengunjung wajib mengikuti aturan dan kapasitas untuk pengunjung yang datang dibatasi sebesar 50 persen, jumlah objek wisata pada masa penanganan pandemi covid-19 menunjukkan terjadinya pengurangan jumlah objek wisata yang signifikan yang mengharuskan beberapa objek wisata ditutup, dampak lain yaitu adanya pembatalan event yang sebelumnya telah di rancang oleh dinas

Pariwisata Kota Padang dengan tujuan menarik wisatawan dan meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Padang, permasalahan yang ditemukan adalah terkendala akibat biaya operasional dan pemeliharaan yang kurang memadai.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pradana,dkk (2021) dengan judul dampak Covid-19 terhadap sektor Pariwisata di objek wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul menunjukkan dampak covid-19 adanya pembatasan yang dilaksanakan oleh pemerintah mengakibatkan wisatawan dari luar daerah tidak ada kunjungan sama sekali diakibatkan keharusan untuk melaksanakan antigen dan terjadinya penurunan wisatawan di objek wisata, seluruh pedagang yang menjual dagangannya turut berdampak akibat adanya pandemi Covid19.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan pada masa penanganan pandemi Covid19 terlihat jumlah objek wisata yang terdapat dikota Padang mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2021 adanya pertumbuhan jumlah objek wisata di Kota Padang.

Dampak Penanganan Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada sektor Pariwisata Kota Padang

Berdasarkan Penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan berdasarkan dampak kebijakan penanganan pandemi Covid-19 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pariwisata, peneliti akan menjelaskan dengan melihat dampak terhadap sumber pendapatan pada sektor pariwisata yang berasal dari Pajak hotel, pajak restoran , pajak hiburan dan retribusi objek wisata :

a) Dampak Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap Pajak Hotel

Dalam melaksanakan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 Kota padang melarang segala akses dari luar untuk masuk ke kota Padang dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 baik untuk perjalanan bisnis ataupun ke daerah tujuan wisata, dengan terbatasnya kunjungan masyarakat dari luar daerah ataupun mancanegara, dan penutupan beberapa objek wisata di kota padang maka berimbas pada jumlah kunjungan hotel dan jumlah akomodasi hotel yang terdapat pada kota padang. Disisi lain, berdampaknya kegiatan di industri hotel ini berdampak langsung pada pendapatan pajak hotel.

Tabel 8. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Hotel) tahun Kota Padang 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
2019	41.246.273.620,00	115.959.241.562,00	35,6%
2020	21.070.809.433,00	62.701.286.804,00	33,6%
2021	27.612.092.250,00	74.298.096.410,00	37,7%
Realisasi s.d 30 September 2022	33.571.381.646,00	84.535.523.084,00	39,7%

Sumber: Bapenda Kota Padang (data di olah)

Terjadinya perubahan terhadap diterimanya pajak hotel pada empat tahun terakhir, terhitung pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel sebanyak 33,6% dibandingkan dari tahun sebesar 35,6% terjadinya pengurangan 2,0% semenjak adanya pandemi pada awal tahun 2020 melahirkan beberapa kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang harus menutup kegiatan di industri perhotelan berdampak pada penerimaan pendapatan hotel, akan tetapi adanya pembebasan pembayaran pajak pada periode April-Mei mengakibatkan kurangnya realisasi penerimaan jika dibandingkan dengan awal pajak hotel pada tahun tersebut. Selanjutnya penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada target awal, sebesar 37,2%. Pada tahun 2021 kewajiban pajak mulai Kembali normal dan walaupun adanya kebijakan PPKM akan tetapi masih memberikan kelonggaran dengan membatasi jumlah kunjungan dan hunian kamar hotel. Industri perhotelan pada tahun 2022 mulai membenah diri dari keterpurukan dua tahun belakang terlihat dengan meningkatnya target penerimaan pajak hotel sebesar 39,7% dan terhitung dalam realisasinya hingga bulan September 2022.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan dimana melalui adanya penerapan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 Kota Padang melarang segala akses dari luar untuk masuk ke kota Padang dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 baik untuk perjalanan bisnis ataupun ke daerah tujuan wisata, dengan terbatasnya kunjungan masyarakat dari luar daerah ataupun mancanegara, dan penutupan beberapa objek wisata di kota Padang maka berimbas pada jumlah kunjungan hotel dan jumlah akomodasi hotel yang terdapat pada kota Padang. Disisi lain, berdampak kegiatan di industri hotel ini berdampak langsung pada pendapatan pajak hotel. Terjadinya perubahan terhadap penerimaan pajak sebelum diterpa pandemi covid-19 terhitung pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel dengan besar

Rp.41.246.273.620,00 yang mana kontribusi pajak hotel akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 35,6% namun semenjak adanya pandemi pada awal tahun 2020 dengan diterapkannya beberapa kebijakan penanganan pandemi covid-19 dan pembebasan pajak pada periode April-Mei masa PSBB, akibatnya kurangnya realisasi penerimaan pajak hotel dan menurunnya kontribusi pajak hotel menjadi 33,6 persen Selanjutnya penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 mengalami peningkatan terlihat dari jumlah kenaikan persentase kontribusi yaitu 37,2persen . walaupun adanya kebijakan PPKM akan tetapi masih memberikan kelonggaran dengan membatasi jumlah kunjungan dan hunian kamar hotel. Industri perhotelan pada tahun 2022 mulai membenah diri dari keterpurukan dua tahun belakang terlihat dengan meningkatnya target penerimaan pajak hotel sebesar Rp.33.571.381.646 yang mana kontribusi terhadap PAD sebesar 39,7persen dibandingkan dari sebelumnya meningkat 6,3 persen.

Menurut penelitian Ristanti (2021) pandemic Covid-19 memberikan dampak terhadap bisnis Grand Orchid Hotel Yogyakarta berdasarkan aspek pendapatan dan juga jumlah karyawan. Adapun upaya dalam menjalankan bisnis perhotelan di masa pandemic dengan memberikan diskon besar untuk kamar dan menu makan di restoran, membuat paket pernikahan dengan kapasitas tamu minimum sebagai dukungan kepada pemerintah mengenai penerapan pembatasan kegiatan masyarakat khususnya pada kegiatan di Hotel Grand Orchid Yogyakarta hotel ini juga mendapatkan sertifikat CHSE dari kementerian dan pemerintah Kabupaten Sleman.

Selain itu, menurut penelitian Bagus Kusuma (2021) Ketatnya penerapan protokol Kesehatan menjadikan mobilitas manusia berubah hampir terhenti, banyaknya keberangkatan dan kedatangan penumpang di bandara Ngurah Rai mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap jumlah tingkat penghunian kamar (TPK) di Bali sehingga berdampak terhadap pendapatan di bisnis perhotelan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebijakan penanganan pandemi berdampak terhadap sektor pariwisata yaitu sektor perhotelan dan akomodasi ditandai dengan adanya

kurangnya tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi yang selama pandemi, hal tersebut memberikan pengaruh akan pendapatan bisnis perhotelan yang mana memberikan pengaruh pula akan kontribusi pajak hotel dari pendapatan Asli daerah Kota Padang.

b) Dampak Penanganan Pandemi-19 Covid terhadap Pajak Restoran

Kebijakan Penangan pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap rumah makan/restoran adanya arahan dan kebijakan penangan membatasi bahkan sampai ditutup selama kebijakan berlangsung, tidak melayani pembelian makan ditempat dan hanya melalui delivery, pembatasan lain. Dengan melihat kondisi yang memburuk, jam operasional yang berkurang hingga pendapatan pelaku usaha yang berkurang sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak restoran/ rumah makan.

Tabel 9. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang tahun 2018 s.d 2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran(Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah(Rp)	Kontribusi pajak hotel terhadap PAD(%)
2019	51.140.836.591,00	115.959.241.562,00	44,0%
2020	35.172.990.251,00	62.701.286.804,00	-56,0%
2021	43.241.010.686,00	74.298.096.410,00	58,0%
Realisasi s.d 30 September 2022	45.139.872.708,00	84.535.523.084,00	53,0%

Sumber: *Bapenda Kota Padang*

Pada tahun 2020 penerimaan pendapatan asli daerah pada pajak restoran terjadinya penurunan sebesar 12,0% yang diakibatkan oleh adanya kebijakan penanganan pandemi covid-19 dan adanya bantuan operasional sehingga dibebaskan dalam masa dua bulan sehingga kontribusi pajak restoran terhadap PAD berkurang sebesar 56%, dibandingkan pada tahun 2019. pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik ditandai dengan kenaikan pajak restoran sebesar 2% dari tahun sebelumnya sehingga kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 58%, diharapkan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2022 melebihi target awal, terhitung pada akhir bulan September diketahui kontribusi pajak restoran sebesar 53% tentunya angka tersebut akan bertambah di akhir tahun 2022.

Kebijakan Penangan pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap rumah makan/restoran adanya arahan dan kebijakan penangan membatasi bahkan sampai ditutup selama kebijakan berlangsung, tidak melayani pembelian makan ditempat dan hanya melalui

delivery, pembatasan lain. Dengan melihat kondisi yang memburuk, jam operasional yang berkurang hingga pendapatan pelaku usaha yang berkurang sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak restoran/ rumah makan. Pada tahun 2020-2021 penerimaan pendapatan asli daerah pada pajak restoran terjadinya penurunan yang diakibatkan oleh adanya kebijakan penanganan pandemi covid-19 dan adanya bantuan operasional sehingga dibebaskan dalam masa 2 bulan. pada tahun 2021 walaupun adanya kelonggaran dalam berkegiatan akan tetapi target pajak yang diharapkan tidak tercapai. Dan pada tahun 2022 diharapkan realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target awal sebesar 50.000.000.000.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hemas & Novi, (2022) Kontribusi Pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada masa new normal mengalami kenaikan akan tetapi termasuk kategori rendah atau sangat kurang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses dan jam operasional restoran, café dan rumah makan.

Menurut penelitian Fitra Dila Lestari, (2021) pemilik restoran mengambil tindakan dengan mengurangi jumlah karyawan dan menerapkan social distancing erta sanitasi yang layak, dan menerapkan layanan pesan antar selama pandemic, operasi bisnis secara bertahap mengalami krisis dan kurangnya dukungan keuangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis ini memperlihatkan dimana restoran mengalami penurunan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah diakibatkan oleh besarnya biaya operasi bisnis restoran, berkurangnya pendapatan diakibatkan pembatasan jumlah pengunjung restoran, serta berkurangnya akomodasi restoran selama masa pandemic di Kota Padang.

c) Dampak Penanganan Pandemi Covid-19 terhadap pajak hiburan

Pemerintah kota padang memberlakukan kebijakan protokol kesehatan, PSBB dan PPKM Sebagian besar mengeluarkan peraturan pembatasan kegiatan diluar rumah dan pembatasan di tempat publik, kegiatan yang sifatnya dapat membuat kerumunan tidak diperbolehkan, sehingga banyak tempat ditutup salah satu tempat yang banyak dikunjungi adalah tempat hiburan. adanya pembatasan bahkan penutupan tempat hiburan berimbas pada kurangnya pengunjung dan berdampak

kepada pendapatan pelaku usaha. Berdasarkan hasil temuan, penerimaan pajak hiburan masih tidak stabil hal itu diakibatkan naik turunnya realisasi penerimaan pada tahun 2018-2022.

Tabel 10. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Padang 2018 s.d 2022

Tahun	Realisasi Pajak hiburan (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah(Rp)	Kontribusi pajak hotel terhadap PAD(%)
2019	9.860.360.021	115.959.241.562,00	9,00%
2020	3.805.101.995	62.701.286.804,00	6,00%
2021	2.883.790.044	74.298.096.410,00	4,00%
Realisasi s.d 30 September 2022	5.187.564.925	84.535.523.084,00	6,00%

Sumber: Bapenda Kota Padang (data diolah)

Pendapatan pajak hiburan yang paling berdampak terjadi pada tahun 2020-2021 diketahui terjadinya penurunan PAD terhadap kontribusi pajak hiburan sebesar 6,00% dan terus berlanjut pada tahun 2021 sebesar 4,00% diakibatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan dua tingkatan yaitu Mikro dan darurat. Namun kontribusi pajak hiburan terhadap PAD terus meningkat terhitung pada akhir bulan September terjadi peningkatan 6% yang mana pajak retribusi sebesar Rp.5.187.564.925 ini merupakan angka yang besar dibandingkan dua tahun terakhir.

Pemerintah kota padang memberlakukan kebijakan protokol kesehatan, PSBB dan PPKM Sebagian besar mengeluarkan peraturan pembatasan kegiatan diluar rumah dan pembatasan di tempat publik, kegiatan yang sifatnya dampat membuat kerumunan tidak diperbolehkan, sehingga banyak tempat ditutup salah satu tempat yang banyak dikunjungi adalah tempat hiburan . adanya pembatasan bahkan penutupan tempat hiburan berimbas pada kurangnya pengunjung dan berdampak kepada pendapatan pelaku usaha. Berdasarkan hasil temuan, penerimaan pajak hiburan masih tidak stabil hal itu diakibatkan naik turunnya realisasi penerimaan pada tahun 2018-2022. Pendapatan pajak hiburan yang paling berdampak terjadi pada tahun 2021, dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan dua tingkatan yaitu Mikro dan darurat. Hal tersebut sangat berdampak pada penerimaan pajak hiburan sebesar 2.883.790.044,

- d) Dampak Penanganan Pandemi Covid-19 terhadap Retribusi Penanganan pandemi Covid-19 mengakibatkan rendahnya pendapatan pada

retribusi dikarenakan pada awal pandemi tidak adanya kunjungan wisatawan di beberapa objek wisata dan setelah diberlakukannya *ner normal* pada tahun 2020 adanya pembebasan pungutan pajak retribusi daerah. Adapun retribusi rekreasi dan olahraga yang paling berdampak terlihat kurangnya pendapatan pada retribusi tersebut.

Tabel 11. Realisasi Penerimaan Retribusi Kota Padang tahun 2018 s.d 2022

Tahun	Realisasi Pajak Retribusi (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah(Rp)	Kontribusi pajak hotel terhadap PAD(%)
2019	2.742.354.266,00	115.959.241.562,00	2,00%
2020	530.477.025,00	62.701.286.804,00	1,00%
2021	112.240.686,00	74.298.096.410,00	-
Realisasi s.d 30 September 2022	127.340.761,00	84.535.523.084,00	-

Sumber: Bapenda Kota Padang

Berdasarkan penerimaan pendapatan pajak retribusi daerah dapat dilihat pada tahun 2020 adanya penurunan yang sangat besar terhadap retribusi kota Padang sebesar Rp.2.211.877.241 yang mana kontribusi retribusi terhadap PAD hanya 1 persen, ini merupakan perubahan yang cukup mengawatirkan. Penurunan pajak retribusi tersebut terus berlanjut hingga bulan September 2022.

Pada penelitian dan analisis ini terkait dampak penanganan pandemic Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata dapat diketahui bahwa penanganan pandemi berdampak terhadap penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak tempat Hiburan dan Retribusi, pendapatan daerah yang lebih berdampak berasal dari Pajak Retribusi dan Pajak Tempat Hiburan yang mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2020-2021 diakibatkan dari adanya kebijakan-kebijakan penanganan pandemic Covid-19 di Kota Padang. Rendahnya Penerimaan pajak Hotel dan Restoran di alami pada tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2021 hingga akhir September 2022 adanya peningkatan signifikan diakibatkan adanya pelanggaran terhadap sector tersebut dan diharapkan dapat mendokrang pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sempat mengalami keterpurukan.

Penangan pandemi Covid 19 mengakibatkan rendahnya pendapatan pada retribusi dikarenakan pada awal pandemi tidak adanya kunjungan wisatawan di beberapa objek wisata dan setelah diberlakukannya *ner normal* pada tahun 2020 adanya pembebasan pungutan pajak retribusi daerah. Adapun retribusi

rekreasi dan olahraga yang paling berdampak terlihat kurangnya pendapatan pada retribusi tersebut. berdasarkan penerimaan pendapatan pajak retribusi daerah bisa diperhatikan pada tahun 2020-2022 belum adanya peningkatan yang signifikan terhadap pajak retribusi daerah kota Padang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan mengenai Dampak Penanganan Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pariwisata Kota Padang, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Objek wisata. Ditandai dengan penurunan PAD pada tahun 2020 sebesar 18,86% dari PAD sektor pariwisata pada tahun 2019 sejumlah Rp. 94.333 Milyar. Hal tersebut diakibatkan karena berbagai program kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di Kota Padang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai dilakukan di awal bulan April hingga bulan Mei 2020 adanya aturan larangan untuk melakukan segala aktivitas di luar rumah pembatasan di pintu masuk Kota Padang bahkan sampai menutup industri pariwisata yang mana berhubungan langsung terhadap industri usaha masyarakat yang ada di Kota Padang

DAFTAR PUSTAKA

- Mustafidah, H & Suwarsito. 2020. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. UM Purwokerto Press : Purwokerto.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Dinas Pariwisata Kota Padang, 2021. *Pemutakhiran Data Kepariwisata tahun 2022*.
- Setligt C Celine dkk. 2022. Penerapan kebijakan protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan kelurahan buyungon kabupaten minahasa selatan jurnal KESMAS, Vol.11,no.2. februari.
- Masbiran, Vivi Ukhwatul K. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pariwisata Sumatera Barat.
- Wicaksono, Suluh Sugeng, 2020. Analisis Dampak Pandemi Terhadap Bisnis Hotel Syariah di Yogyakarta
- Hellen, Angga Devy., dan R.B Soemanto, 2017. Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Sosiologi DILEMA*.32(1)
- Bagus Kusuma Wijaya & Wayan Eny Mariani, (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Perhotelan di Bali. *Warmaewa Management and Business Journal*, 3(1)pp.49-59
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Urnal Brand*, Volume 2 No. 1, Juni 2020, Ii, 123-130.
- Maya Intan Pratiwi, S. M. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm. *Jurnal Ners*, Iv, 30-39.
- Nismawati, & Cahyadi, N. (2020). Perekonomian Masyarakat Kelurahan Tounsar Pasca Merebaknya Wabah Covid-19. *Indonesian Journal Of Economics, Entrepreneurship And Innovation*, I, 54-61.
- Putu Pradiva Putra Salain, Made Santana Putra Adiyadnya, & Putu Agus Eka Rismawan. (2020). Studi Eksplorasi Dampak Work From Home Pada Kinerja Karyawan Bum Di Wilayah Denpasar Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Satyagraha*, Iii, 19-27.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, I, 109-120.
- Sugihamretha, I. D. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Indonesian Journal Of Development Planning Volume Iv No. 2 – Juni 2020*, Iv, 191-206
- Sumbar, BPS. 2020. Analisis Isu terkini Prov. Sumbar tahun 2021. BPS. Prov. Sumbar. sumbar.bps.go.id, <https://sumbar.bps.go.id>

- bar.bps.go.id/publication/2021/06/30/cb624d2ff3db0a330ebe9928/analisis-isu-terkini-provinsi-sumatera-barat-2020--analisis-dampak-covid-19-terhadap-kondisi-sosial-ekonomi-.html
- Ppid.padang, 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. https://ppid.padang.go.id/uploads/audios/pidpadang_62e0b3f05594e.pdf
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf>
- Surat Edaran, No 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021, Tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pengendalian Pandemi Covid-19 . <https://posmetropadang.co.id/ppkm-di-kota-padang-bersama-lawan-corona/>
- Surat Edaran, No 400.628/BPBD-Pdg/VII/2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). <https://posmetropadang.co.id/ppkm-di-kota-padang-bersama-lawan-corona/>
- Kemenparekraf, 2020. Panduan Pelaksanaan,Kebersihan,Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Di Daya Tarik Wisata <https://kemenparekraf.go.id/pustaka/Panduan-Pelaksanaan-Kebersihan,-Kesehatan,-Keselamatan,-dan-Kelestarian-Lingkungan-untuk-Sektor-Parekraf>